



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



Kinerja 3 Pilar PBK, SRG, PLKA

Berita Utama.....4-7

- Kinerja Tiga Pilar

Berjangka.....8-9

- Gong Tarik Investasi PBK Kembali Bertalu

Resi Gudang.....10-13

- SRG Ciptakan Petani Produktif & Efisien
- Menyorot Pelaksanaan SRG

Agenda Foto.....14-15

Aktualita.....16-17

- Dinyatakan Pailit Izin usaha CAF Dicabut
- Toko Modern Wajib Pasarkan 80% Produksi Dalam Negeri
- Wajah Baru Pejabat Bappebti 2014
- Kamendag Tetapkan HBP Kedelai

Analisa.....18

Breaknews.....19

Info SRG.....20-21

Wawasan...22-23

7 Mata Uang Terkuat di Dunia



Kolom...24-25

Integrasi Pasar Spot dan Bursa Berjangka



Kiprah...26-27

Jangan Pandang Sebelah Mata Tenaga Marketing



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu Jawab
Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi
Junaedi

Wakil Pemimpin Redaksi
Subagiyo

Dewan Redaksi
Natailus Nainggolan, Himawan Purwadi,
Mudo Supriyanto, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Yetty Widyawarini,
Tomi Setiawan, Harry Prihatmoko,
Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172,
Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Wamendag Bayu Krisnamurthi memberi pengarahan dan berdiskusi bersama Pejabat Bappebti.

Salamat bertemu kembali di tahun 2014 bagi para pembaca tercinta di ruang publik Buletin Kontrak Berjangka, Bappebti.

Dan tentunya seperti biasa di awal tahun, sungguh banyak yang direncanakan dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2014 ini. Namun, langkah perencanaan itu setelah dilakukan evaluasi dari hasil kegiatan di tahun sebelumnya.

Hal itulah yang dilakukan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, saat menyambangi Gedung Bappebti, pada 7 Januari 2014, dan melakukan diskusi mendalam terkait Tupoksi Bappebti. Dalam paparannya, Wamendag menaruh harapan penuh dan sedianya pelaku pasar binaan Bappebti di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi agro, mampu menjadi penggerak perekonomian nasional. Terutamanya, dalam memperkuat perekonomian Indonesia di era perdagangan bebas ASEAN 2015, mendatang. Wamendag meyakini, tiga instrumen yang diawasi dan dibina Bappebti itu, jika maksimal berkontribusi bagi perekonomian nasional akan menjadi kekuatan dan mensejajarkan sektor riil dengan pasar derivatif.

Terkait itu, dalam edisi awal tahun 2014 ini, Redaksi menyuguhkan laporan pencapaian dari tiga instrumen yang dibina dan diawasi Bappebti. Ada progres yang signifikan selama tahun 2013 jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2012. Namun, progres itu belum seperti yang diharapkan semua pihak.

Di bidang perdagangan berjangka komoditi, transaksi para pelaku pasar masih mendominasi perdagangan bilateral. Hal ini dikarenakan masih rendahnya animo dan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka multilateral berbasis komoditi

pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Demikian juga dengan bidang SRG dan pasar lelang komoditi. Instrumen yang seharusnya pengerak ekonomi daerah ini, belum menunjukkan kinerja maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat- petani dan belum fokusnya pemerintah daerah di dalam menjalankan program tersebut.

Sebab itu, langkah yang harus terus dan berkelanjutan dilakukan Bappebti adalah edukasi, sosialisasi dan koordinasi kepada para pelaku pasar serta pemerintah daerah.

Laporan lain yang disajikan Redaksi pada edisi ini yakni, menyangkut dikeluarkannya industri perdagangan berjangka komoditi dari Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir tahun 2013. Tentu hal ini menjadi berita baik bagi pelaku perdagangan berjangka yang berasal dari luar negeri. Sebab, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah penduduk produktif sekitar 45 juta jiwa. Di sisi lain, kelompok masyarakat ekonomi menengah Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penghasilan.

Namun, dari sisi kebijakan Bappebti, ditegaskan, perusahaan modal asing di bidang perdagangan berjangka komoditi tidak diperbolehkan bertransaksi pada kontrak bilateral. Artinya, perusahaan asing hanya boleh bertransaksi pada kontrak-kontrak multilateral.

Pembaca yang budiman, dalam memasuki tahun penerbitan ke 13 Buletin Kontrak Berjangka, Redaksi direncanakan melakukan perwajahan baru. Sebab itu, Redaksi sungguh berharap mendapat masukan dan saran demi pengembangan media ini untuk masa mendatang.

Salam!



Kinerja 3 Pilar PBK, SRG, PLKA

Realisasi PBK, SRG dan PLKA di tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Memasuki tahun 2014, tak ada salahnya jika kita melongok pelbagai hal yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terhadap 'Tiga Pilar' bidang yang dibina dan diawasi.

Bappebti sebagai regulator Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Agro Komoditi (PLKA), sepanjang 2013 telah berusaha maksimal untuk mengembangkan 3 pilar utamanya tersebut. Dan, capaian kinerja Bappebti di tahun 2013, tentunya menjadi sebuah acuan penting untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.

Di bidang industri PBK 2013, tercatat jumlah dan nilai transaksi kontrak berjangka komoditi mengalami peningkatan. Tak hanya itu, tahun 2013 menjadi tahun bersejarah dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Dengan Permendag ini, setiap eksportir terdaftar (ET) timah yang ingin mengekspor timah batangan, wajib terlebih dahulu memperdagangkannya di bursa timah. Kebijakan ini, tentunya akan meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara eksportir utama komoditi timah.

Sementara itu, implementasi SRG dan PLKA di berbagai daerah sudah berjalan ke arah yang positif. Meski demikian, Bappebti masih harus terus mengencangkan sosialisasi dan edukasi agar dua instrumen dapat berjalan optimal dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Intinya, menurut Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, kepada Buletin Bappebti, awal Januari lalu, implementasi PBK, SRG, dan PLKA tahun 2013 sudah berjalan ke arah tujuan yang diharapkan. "Tapi, memang masih harus terus ditingkatkan. Dan semua itu perlu kerja keras dan kerjasama yang sinergis dengan semua pihak terkait," imbuh Sutriyono.

Sektor PBK

Pada tahun 2013, volume dan nilai transaksi di dua Bursa Berjangka yakni di Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif

Indonesia (BKDI) mengalami peningkatan. Tercatat, volume transaksi kontrak berjangka multilateral pada tahun 2013 (per 31 Desember) sebesar 1.257.830 lot. "Jumlah itu meningkat 121.494 lot atau 10,69% jika dibandingkan dengan volume pada tahun 2012 yang sebesar 1,136,336 lot," kata Sutriyono.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan perizinan oleh Bappebti di tahun 2013 antara lain pedagang penyelenggara SPA sebanyak 1 pedagang, pialang berjangka sebanyak 5 Perusahaan, Wakil Pialang Berjangka sebanyak 523 orang.

Di sisi lain, terbitnya Permendag No. 32 Tahun 2013, tentang, Ketentuan Ekspor Timah telah melahirkan Pasar Fisik Timah di BKDI pada 30 Agustus 2013, lalu. Maka sesuai dengan Permendag itu, setiap eksportir terdaftar (ET) timah yang ingin mengekspor timah batangan, wajib terlebih dahulu memperdagangkannya di Bursa Timah BKDI.

"Dengan diluncurkannya Pasar Fisik Timah di BKDI, maka Indonesia telah memiliki referensi harga untuk komoditi timah yang dapat dijadikan harga acuan," imbuh Sutriyono.

Sejalan dengan tujuan dibentuknya Bursa Timah BKDI, maka pergerakan harga timah kian menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sebelumnya, harga timah di London Metal Exchange (LME) berada di posisi US\$ 21.000 per ton. Dan, setelah diluncurkan perdagangan timah di Bursa Timah BKDI, harga timah hingga 31 Desember 2013 terus meningkat.

Berdasarkan data BKDI, hingga akhir tahun 2013, harga timah di Bursa Timah BKDI ditutup berkisar US\$ 24.100 per ton. Adapun total transaksi yang diperdagangkan sebesar 3658 lot atau 18.290 ton atau senilai US\$ 423.639.877.

Sementara itu, pada 20 Desember 2013 lalu, JFX telah meluncurkan tiga produk baru untuk kontrak multilateral, yaitu kontrak berjangka kopi, kontrak berkala emas dan pasar fisik karet. "Hal itu menunjukkan produk kontrak komoditi berjangka mengalami perkembangan," papar Sutriyono.



Sektor SRG

SRG menjadi salah satu pilar utama yang terus dikembangkan Bappebti sebagai instrumen pembiayaan pasca panen, karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang. Instrumen ini juga memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan penyediaan stok komoditi nasional, khususnya untuk komoditas beras, gabah, dan jagung.

Untuk mengoptimalkan ketahanan pangan tersebut, pada tahun 2013 resi gudang yang diterbitkan mencapai sebanyak 532 resi dengan volume komoditi yang disimpan di gudang mencapai 20,796.23 ton atau senilai Rp 108.95 miliar.

Pencapaian itu meningkat 40 % jika dibandingkan dengan resi gudang yang diterbitkan pada tahun 2012 yang hanya sebesar 379 resi dengan volume komoditi tersimpan di gudang sebanyak 18,144.16 ton atau senilai Rp 93.18 miliar.

Dari 532 resi gudang yang diterbitkan selama tahun 2013, sebanyak 442 resi gudang yang telah diagunkan dan telah mendapatkan pembiayaan dari bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 65,64 miliar.

Di sisi lain, pada tahun 2013 juga dilaksanakan Seminar Nasional SRG yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013. "Seminar itu, dibuka langsung oleh Menteri Perdagangan dan Gubernur Jawa Tengah yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari Kelompok Tani dan Gapoktan serta Dinas yang telah melaksanakan maupun yang belum melaksanakan SRG," jelas Sutriyono. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Pengelola Gudang dan Kelompok Tani serta Pemda dengan kategori terbaik dalam pelaksanaan SRG.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, persetujuan Kelembagaan Sistem Resi Gudang pada tahun 2013 telah diberikan kepada 23 Gudang dan 18 Pengelola Gudang. Sepanjang tahun 2013 juga telah dibangun 13 Gudang SRG melalui dana Alokasi Khusus di 13 Kabupaten yaitu Banyuwangi, Dompu, Bener Meriah, Aceh Besar, Bireun, Konawe, Sambas, Ciamis, Kepahiang Bengkulu, Bondowoso, Langkat, Pematang dan Banyuasin.

Selain itu, Bappebti juga melengkapi Infrastruktur dan sarana gudang seperti dryer dan rumah dryer, yang dibangun pada tahun 2010 di 5 kabupaten yaitu Purwakarta, Pidie, Masohi, Mamuju dan Palopo.

Sektor PLKA

Perkembangan transaksi PLKA untuk tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu terlihat antara lain dari total nilai transaksi PLKA selama tahun 2013 yang mencapai Rp 1.064.804.471.300 atau meningkat 29.55 % bila dibandingkan transaksi pada tahun 2012 yang sebesar Rp 825.238.707.000.

Adapun pelaksanaannya telah dilakukan di 14 provinsi dan yaitu Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan DKI Jakarta (APBD) dan 1 Pasar Lelang yang dikelola Swasta (i-Pasar).

Sementara itu, untuk komoditi unggulan PLKA di berbagai daerah sangat beragam. Antara lain, Pupuk Organik, Beras, Jagung, Kelapa, Kentang, Cabe, Cengkeh, Rumput Laut, Gapek, Bibit Jati Bongsor dan Kayu Jati.



Penyempurnaan Peraturan PBK dan SRG

Sementara itu, untuk mendongkrak kinerja industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia, Bappebti telah melakukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan teknis yang diterbitkan Bappebti di tahun 2013.

"Hal itu dalam rangka mendukung sepenuhnya peningkatan kinerja transaksi multilateral di bursa berjangka," ujar Sutriono Edi.

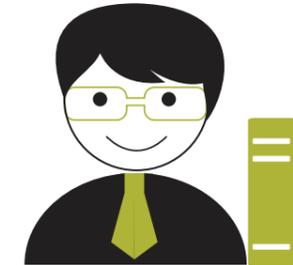
Adapun kebijakan tersebut antara lain pengaturan tentang: (1) Tata cara pemberian izin Wakil Pialang Berjangka, termasuk persyaratan pengajuan izin, ketentuan pembekuan izin dan pencabutan izin sebagai Wakil Pilang Berjangka. (2) Pelaksanaan Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. (3) Larangan penyertaan penanaman modal asing bagi Pedagang Berjangka Penyelenggara

Sistem Perdagangan Alternatif. (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Batangan Untuk Tujuan Ekspor Melalui Bursa Timah. (5) Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pialang Berjangka. (6) Kewajiban Pelaporan Keuangan Dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka. (7) Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. (8) Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Luar Negeri.

Selain itu, pada tahun 2013, Bappbebti telah melakukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan teknis tentang SRG. Peraturan yang diterbitkan itu, yakni Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2013, tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006.

Perdagangan Berjangka 5 Sasaran Strategis 2014

Untuk mendongkrak kinerja industri PBK pada tahun 2014, Bappebti selaku regulator telah menetapkan beberapa sasaran strategis. Menurut Sutriono Edi, ada 5 sasaran dan strategi pengembangan industri PBK di tahun 2014, yaitu:



Pertama, peningkatan likuiditas transaksi kontrak berjangka multilateral. Untuk mencapainya melalui beberapa cara, diantaranya: Pengembangan kontrak-kontrak berjangka multilateral baru yang memiliki potensi keberhasilan tinggi; Pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan transaksi yang lebih *user friendly*; Peningkatan promosi, sosialisasi dan edukasi kepada pelaku pasar, hedger, investor, dan produsen komoditi baik didalam maupun luar negeri; Peningkatan kordinasi yang sinergis antara pelaku komoditi, asosiasi komoditi, instansi/lembaga terkait.



Kedua, peningkatan kredibilitas bursa berjangka, dengan melalui cara sebagai berikut: Pengembangan kerjasama bursa dalam negeri dan luar negeri; Peningkatan sinergi diantara para pemangku kepentingan di industry PBK;

Ketiga, peningkatan kredibilitas otoritas Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui: Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang PBK, termasuk SDM penegak hukum, auditor dan PPNS Pedagangan Berjangka; Pengaturan kebijakan yang mendukung penciptaan iklim usaha PBK yang kondusif; Penegakan hukum yang adil dan transparan.



Keempat, kerangka regulasi yang selaras, menjamin kepastian hukum, adil dan transparan, diantaranya: Menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No.10 Tahun 2011; Mengupayakan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Kementerian dan Instansi lainnya



Kelima, tata kelola kelembagaan industri PBK yang dapat memberikan pelayanan prima dan pemahaman yang selaras dari pengguna jasa.

Perpres Revisi DNI Gong Tarik Investasi PBK Kembali Bertalu

Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) akan mempertegas dan menguatkan peran aktif asing di industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.



Invest in Remarkable Indonesia. Demikianlah slogan yang senantiasa digaungkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan untuk menunjang hal tersebut, Selasa (24/12/2013) lalu, para pemangku kebijakan ekonomi Indonesia dan sejumlah stekholder telah duduk bersama merampungkan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Revisi DNI itu nantinya akan mengubah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian, maka para pemodal asing akhirnya dapat lebih jelas mengetahui sektor usaha mana saja telah terbuka bagi kepemilikan asing di Indonesia.

"Ini sudah final dan revisi Perpres No 36. Tahun 2010 siap diajukan ke Presiden untuk disahkan," kata Kepala BKPM, Mahendra Siregar.

Menurut Mahendra, sejumlah poin revisi DNI tersebut, ada beberapa bidang usaha yang mengalami kenaikan

porsi Penanaman Modal Asing (PMA) dan ada pula yang mengalami penurunan.

Bidang-bidang yang direvisi tersebut, terbagi dalam lima kategori, diantaranya: *Pertama*, bidang usaha yang menjadi lebih terbuka untuk PMA. Diantaranya mencakup sektor perhubungan, sektor kesehatan, sektor Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sektor keuangan.

Kedua, bidang usaha yang lebih terbatas untuk PMA, yaitu jasa perdagangan. Untuk poin pembatasannya, antara lain, distributor dikecilkan besaran investasinya menjadi 33 persen, pergudangan dikecilkan besaran investasinya menjadi 33 persen, Cold Storage untuk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali dikecilkan menjadi 33 persen dan untuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dibuka sebesar 67 persen.

Ketiga, bidang usaha yang mengalami harmonisasi penyederhanaan pengaturan kepemilikan saham asing, yaitu di sektor

komunikasi dan informatika. Diantara poinnya, antara lain, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap ditetapkan besaran investasi asingnya sebesar 65 persen, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap terintegrasi dengan jasa multimedia ditetapkan besaran investasi asingnya sebesar 65 persen, penyelenggaraan jasa multimedia ditetapkan besaran investasi asingnya sebesar 49 persen.

Keempat, ketentuan PMA untuk proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Diantaranya meliputi sektor perhubungan, sektor pekerjaan umum, dan sektor ESDM.

Kelima, bidang usaha yang disesuaikan dengan Undang-undang atau peraturan lainnya. Diantaranya meliputi sektor perdagangan dan sektor pertanian.

Menurut Mahendra, pandangan dari revisi tersebut bukan hanya melihat dari sudut perekonomian Indonesia tetapi juga melihat kebutuhan dan kondisi pada masing-masing sektor. Revisi tersebut juga dilakukan dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi makro. Sehingga, diharapkan dengan dibukanya sejumlah bidang usaha bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak nilai Investasi.

"Pelonggaran aturan investasi ini bertujuan menambah daya tarik investasi di Indonesia. Tahun depan kita menargetkan investasi asing masuk sekitar Rp 450 triliun, atau naik sekitar 15% dibanding tahun 2013 yang senilai Rp 390,30 triliun. Lagi pula, sektor bisnis yang dibuka bagi asing rata-rata membutuhkan modal besar," jelas Mahendra.

Sesuai SK

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) menjadi daftar revisi DNI di sektor perdagangan yang masuk ke dalam kategori bidang usaha yang disesuaikan dengan UU atau peraturan lainnya. Bidang usaha PBK tersebut, direvisi dengan acuan pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Disebutkan, pedagang berjangka penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) izin usahanya tertutup untuk PMA. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Bappebti No. 103/BAPPEBTI/PER/03/2013 tentang Larangan Penyertaan Penanaman Modal Asing Bagi Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

Sementara untuk pialang berjangka, komposisi kepemilikan modal asing diizinkan maksimal 95 persen, sesuai dengan SK Kepala Bappebti No. 74/BAPPEBTI/PER/12/2009 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka. Tapi dalam teknisnya, pialang berjangka dengan kepemilikan 95 persen modal asing tersebut, hanya diperbolehkan melakukan kontrak berjangka multilateral, yang mencakup kontrak komoditi primer dan Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN). Dan, tidak diizinkan untuk melakukan kontrak berjangka bilateral atau juga dikenal SPA.

Menurut Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Sri Nastiti Budianti, ketentuan tersebut telah tercantum dalam SK Kepala Bappebti Nomor 76 Tahun 2009, tentang Larangan bagi Pialang Berjangka Penanaman Modal Asing untuk Bertransaksi dalam SPA. "Mohon dicermati, revisi DNI itu menyesuaikan SK Kepala Bappebti dan pialang asing tetap tidak diizinkan untuk melakukan transaksi SPA," tegasnya.

Sekedar mengingatkan, pada awal Desember 2009 lalu, Bappebti selaku otoritas pengawas PBK, telah lebih dahulu mengeluarkan kebijakan membuka peluang bagi pihak asing untuk mendirikan perusahaan pialang berjangka dengan kepemilikan PMA mak-

//
**Mohon dicermati,
revisi DNI itu
menyesuaikan SK
Kepala Bappebti dan
pialang asing tetap
tidak diizinkan untuk
melakukan transaksi
SPA**
//



simal 95 persen. Kebijakan itu didorong dari rendahnya likuiditas kontrak berjangka multilateral, sedangkan transaksi SPA justru mendominasi transaksi di bursa berjangka.

Saat itu, Bappebti telah mengeluarkan 3 SK Kepala Bappebti, diantaranya, SK No: 74/BAPPEBTI/Per/12/2009, SK No. 75/BAPPEBTI/Per/12/2009 dan SK No. 76/ BAPPEBTI/Per/12/2009. Ketiga SK tersebut berkaitan dengan upaya menggandeng pihak asing untuk masuk ke Indonesia demi mengembangkan bisnis PBK.

"Dalam tiga SK tersebut memang memuat ketentuan tentang terbukanya kesempatan bagi pihak investor asing untuk masuk ke Indonesia. SK ini antara lain dikeluarkan dalam rangka upaya mengembangkan dan mendorong kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga," kata Kepala Bappebti yang saat itu dipimpin oleh Deddy Saleh.

Alhasil, hingga akhir tahun 2013, baru terdapat dua perusahaan pialang berjangka asing yang menjadi anggota bursa berjangka Indonesia. Antara lain, yakni PT Phillip Futures (PF) yang menjadi anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Dan, PT Ong First Tradition Futures yang merupakan anggota Jakarta Futures Exchange (JFX).

Positif

Direktur PF, Riswan Januar Bunaidy, mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan pembahasan DNI yang

nantinya akan mengubah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010. "Peraturan tersebut akan semakin memperjelas SK Kepala Bappebti No. 74 tahun 2009 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka," katanya.

Di sisi lain, Riswan juga tidak merasa keberatan dengan larangan perusahaan asing untuk melakukan kontrak berjangka bilateral. "PF fokus untuk meningkatkan kontrak multilateral. Bicarakan saja teman-teman dari pialang lokal yang menggarap SPA," imbuhnya.

Adapun dari kacamata Direktur Jakarta Futures Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo, pialang berjangka lokal memang belum siap bersaing dengan perusahaan pialang asing baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia (SDM) maupun dalam penggunaan teknologi. Dengan dibukanya kesempatan perusahaan pialang berjangka asing beroperasi di Indonesia, dapat dipastikan akan menjadi momok yang menakutkan bagi pialang lokal.

"Tentunya kebijakan pemerintah itu harus menjadi warning bagi perusahaan pialang berjangka lokal. Mereka harus kerja keras untuk itu. Kalau tidak, asing akan mendominasi industri ini. Karena dari sisi permodalan, SDM dan teknologi, pihak asing pasti lebih siap," jelas Bihar.

Namun demikian, Bihar melihat, ada juga hal positif dengan masuknya perusahaan pialang asing ke Indonesia. "Setidaknya akan meningkatkan likuiditas bursa dan akan ada kompetisi. Sehingga, perusahaan pialang lokal juga akan lebih baik," pungkas Bihar.

SRG Ciptakan Petani Produktif & Efisien



Tokoh Koperasi, Adi Sasono



Kepala Bappebti, Sutriono Edi

Indonesia sebagai negara berdaulat dan bermartabat, harus memiliki ketahanan pangan dan mampu bersaing dengan negara-negara penghasil pangan lainnya. SRG adalah salah satu sarana mencapai ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas petani.

Adi Sasono, salah satu tokoh koperasi nasional yang juga pembina Koperasi Selaras, Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG), Desa Dasan Baru Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mengatakan, SRG merupakan instrumen yang menghubungkan antara seluruh simpul agribisnis dari hulu ke hilir. "Dilihat dari perannya, SRG ini menghubungkan seluruh stakeholder agribisnis. Komoditi jagung yang saat ini tersimpan di gudang SRG, adalah berkat upaya dari instansi pertanian di dalam memberi penyuluhan kepada petani. Demikian juga ketika petani membutuhkan pembiayaan untuk musim tanam berikutnya dapat menjamin Resi Gudang ke perbankan," jelas Adi Sasono, di saat memberi sambutan peyerahan gudang SRG dari Kementerian Perdagangan kepada Pemda NTB dan penerbitan Resi Gudang jagung, pada 24 Desember 2013 di Desa Dasan Baru Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, NTB.

Hadir dalam peresmian gudang tersebut mewakili Kementerian Perdagangan yakni Kepala Bappebti,

Sutriono Edi, Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintaryo, dan Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto. Sedangkan dari pihak Pemda NTB dihadiri Wakil Gubernur NTB, Hamuh Amin, dan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.

Lebih jauh dijabarkan Adi Sasono, SRG juga dapat menumbuhkan tenaga pertanian yang produktif dan efisien. "Sehingga NTB tidak lagi dikenal sebagai kantong penyedia tenaga kerja ke luar negeri."

"SRG ini akan membuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan dan bermartabat karena bisa bersaing dengan negara-negara penghasil pangan lainnya seperti Thailand dan Vietnam," kata Adi Sasono.

Senada dengan itu, Kepala Bappebti, Sutriono Edi, mengatakan, dengan pembangunan gudang SRG diberbagai daerah yang hingga saat ini berjumlah 92 unit merupakan antisipasi pemerintah agar petani mampu bersaing dengan komoditi pangan dari luar negeri.

"Di era perdagangan ASEAN Economic Community-AEC 2015, nanti, pintu perdagangan semakin terbuka, kalau petani kita tidak mampu bersaing, maka

besar kemungkinan komoditi pangan akan membanjiri Indonesia. Sebab itu, dengan SRG pemerintah berharap petani semakin pintar berbisnis dan membaca tren pasar," kata Sutriono.

Sebab itu, tambah Sutriono Edi, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Pusat adalah membantu peningkatan perekonomian daerah, yang salah satunya melalui pembangunan gudang di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Gudang ini telah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2012 dan dibangun dengan dana DAK Tahun 2012.

"Gudang SRG ini adalah salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha dengan agunan inventori (komoditas yang disimpan di gudang) yang dimiliki pelaku usaha, terutama kelompok tani dan UKM. Resi gudang diterbitkan oleh Pengelola Gudang dan dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat menjamin resi gudang untuk memperoleh modal kerja dan kebutuhan pembiayaan," kata Sutriono Edi.

Menurut Kepala Bappebti, Program DAK merupakan upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah di sektor perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah adalah melalui penguatan subsektor perdagangan dalam negeri yang efisien guna menunjang daya saing pasar di dalam dan luar negeri. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kompetisi global yang semakin ketat.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha terutama petani dan UKM, imbuh Kepala Bappebti.

Meningkat 15%

Berdasarkan catatan Bappebti, secara akumulatif sampai dengan 20 Desember 2013, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan terdapat



Wakil Gubernur NTB, Hamuh Amin, menandatangani prasasti peresmian gudang SRG Lombok Timur disaksikan Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Adi Sasono dan Kepala Bappebti Sutriono Edi

sebanyak 1.264 resi dengan total volume komoditi sebanyak 50.492,73 ton (43.313,45 ton gabah; 4.697,20 ton beras; 2.041,7 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 420 ton rumput laut). Nilai total komoditi yang masuk ke gudang SRG tersebut mencapai sebesar Rp 251,49 milyar.

Dikatakan Sutriono Edi, dengan semakin berkembangnya implementasi SRG, transaksi Resi Gudang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2012 jumlah resi yang diterbitkan mencapai 379 resi dengan nilai mencapai Rp 93,18 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar 40 % dibandingkan tahun 2011 sebanyak 271 resi dengan nilai mencapai Rp 40,06 miliar. Sedangkan sampai pertengahan Desember 2013, jumlah resi yang diterbitkan mencapai 524 resi dengan nilai mencapai Rp 106,76 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar 15% dibandingkan total penerbitan resi sepanjang tahun 2012 sebanyak 379 resi dengan nilai mencapai Rp 93,18 miliar.

"Walaupun mengalami peningkatan, potensi volume hasil panen petani secara nasional masih cukup besar, sehingga volume komoditas yang disimpan dalam gudang SRG masih perlu ditingkatkan agar dapat menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam memperhitungkan stok pangan nasional," jelas Sutriono Edi.

Pembiayaan Bank

Pelaksanaan SRG di wilayah Kab. Lombok timur telah memperoleh persetujuan dan perizinan dari Bappebti dengan keluarnya SK Kepala Bappebti No. 34/Bappebti/Kep-SRG/

SP/GD/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan dapat melakukan pembiayaan melalui BRI.

Sebagai catatan, pembiayaan Resi Gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun Lembaga Keuangan Non-Bank yaitu PKBL PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM. Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sampai Desember 2013 sebesar Rp 157,88 miliar atau rata-rata 70 % dari nilai resi gudang yang diagunkan.

Kepala Bappebti menyampaikan bahwa yang perlu dipersiapkan dalam implementasi SRG di daerah antara lain kelembagaan dalam SRG, sarana dan prasarana seperti gudang dan perlengkapannya, ketersediaan mesin pengering, serta kesiapan lembaga keuangan di daerah. Selain itu, peran Pemda dalam memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan maupun sosialisasi, serta pemahaman teknis dari para pelaku usaha yang terlibat dalam SRG juga sangat dibutuhkan.

"Dengan peresmian gudang SRG ini diharapkan Kab. Lombok Timur dapat segera menerapkan skema SRG dan mendapatkan manfaatnya, terutama manfaat ekonominya yang sangat besar, seperti yang telah dirasakan oleh daerah lain di Indonesia," tandas Sutriono Edi. ☺



Menyorot Pelaksanaan SRG

Wajah SRG hingga Januari 2014 tampak cerah, meski pun dalam realisasinya masih menghadapi banyak kendala.

Bappebti sebagai lembaga pembina dan pengawas Sistem Resi Gudang (SRG) pada periode Januari 2014 melaksanakan kegiatan pemrosesan persetujuan pengelola gudang atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Tuntung Pandang di Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Untuk dapat memperoleh izin pengelola gudang, Tim Pemeriksa Bappebti melakukan pemeriksaan kesiapan manajemen dan fisik gudang SRG. Dalam kesempatan pemeriksaan itu, Tim Bappebti diterima Karlian C, yang bertindak selaku Ketua Koperasi Tuntung Pandang. Dan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan kelengkapan Koperasi Tuntung Pandang, telah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Koperasi Tuntung Pandang didirikan pada tahun 1980 ditunjuk sebagai KUD-Modal berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Koperasi No. 146/DK/KPTS/A/VI/1980. Koperasi Tuntung Pandang saat ini mempunyai kegiatan pengadaan sarana produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan pengelolaan penggilingan padi. Di samping itu, Koperasi Tuntung Pandang

mempunyai modal sendiri sebesar Rp 441.816.341.

Adapun susunan pengurus KUD, antara lain, Ketua Karlian C, Sekretaris Sri Sulistiawati dan Bendahara Mahdiyanoor serta jumlah pegawai sebanyak 12 orang. SDM koperasi telah memiliki kemampuan teknis pengelolaan barang, dengan adanya sertifikat pelatihan pengelolaan barang SRG dan pendampingan pengelolaan gudang dari PT. Bhandha Ghara Rekso sejak tahun 2010 hingga 2013. Untuk penerbitan Resi Gudang akan dilakukan oleh Karlian C dan Mahdiyanoor.

Dari hasil penelitian dan penilaian dokumen, wawancara serta pemeriksaan prasarana dan sarana fisik dalam rangka persetujuan pengelola gudang kepada Koperasi Tuntung Pandang, Tim Bappebti merekomendasikan bahwa persetujuan pengelola gudang dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain mendatangi pengelola gudang, Tim juga melihat lokasi lahan yang nantinya digunakan sebagai tempat bangunan dan Rice Milling Unit (RMU). Berdasarkan pemantauan lahan yang disediakan telah sesuai dan tempatnya di area gudang SRG sehingga terintegrasi dengan dryer dan gudang.

Pengawasan dan Monitoring

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pada periode Januari 2014, Bappebti juga melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap gudang SRG di Tukdana-Indramayu, Jawa Barat. Dari pengawasan yang dilakukan Tim selama berada di gudang Tukdana, dilaporkan hasil kegiatan sebagai berikut; Gudang SRG di Tukdana, Indramayu adalah gudang milik PT Pertani yang telah mendapat Persetujuan sebagai gudang dengan SK Kepala Bappebti No. 25/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/GD/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Terdapat 2 gudang yang mendapat ijin dengan kapasitas masing-masing 1.000 dan 1.500 ton gabah dan beras.

Dan dalam rangka pemeriksaan teknis terhadap Gudang Tukdana tersebut, yang menjadi objek pemeriksaan yakni mencakup; pemeriksaan terdapat dokumen penerbitan resi gudang (RG) dengan mengambil sampel sebanyak 11 dokumen RG, terdiri dari 2 dokumen RG yang sudah keluar dan 9 dokumen RG yang masih aktif. Adapun objek pemeriksaan terhadap surat permohonan penyimpanan di gudang,

hasil uji mutu komoditi, dokumen cetak penerbitan RG serta hubungan pemeriksaan waktu dan tanggal antara permohonan penyimpanan komoditi dalam gudang dengan uji mutu dan penerbitan RG. Setelah diteliti secara umum penerbitan RG sudah sesuai prosedur dan dinyatakan benar.

Tim juga melakukan cek fisik terhadap komoditi yang ada di gudang pada gudang 1 dan gudang 2. Semula Tim percaya dan yakin bahwa di dalam gudang masih ada barang sebagai penjaminan, namun setelah Tim telusuri secara mendalam antara RG yang sudah keluar dengan RG yang masih jadi jaminan di Bank tidak sama dan Tim menemukan adanya kejanggalan dan menjadi temuan tim lapangan, yaitu; dari jumlah RG yang sudah keluar dan sudah dilunasi di bank sebanyak 35 dokumen RG, sehingga seharusnya masih ada 81 dokumen RG yang masih jadi jaminan di Bank BJB.

Dengan mengecek kartu stok barang ternyata hanya terdapat 44 RG dengan jumlah volume 773,36 ton dengan total nilai Rp. 4.870.147.000. Sementara 37 RG dengan volume 679,545 ton dengan total nilai Rp. 4.075.381.500 telah dikeluarkan terlebih dahulu sekitar akhir Desember 2013, walaupun masih menjadi jaminan di Bank BJB dan belum dilunasi kreditnya. Jatuh tempo RG sekitar bulan Februari Mei 2014. Data ini telah diverifikasi kembali melalui ISWARE Data 37 pemilik RG sebagaimana terlampir.

Dari hasil investigasi yang dilakukan Tim, alasan kepada Pengelola Gudang dalam hal ini PT. Pertani mengeluarkan barangnya yang disimpan di Gudang Tukdana Indramayu tersebut, walaupun pemilik barang belum melunasi kreditnya di bank antara lain sebagai berikut: pada akhir Desember 2013 harga gabah pada saat itu cenderung terus menurun sehingga pemilik barang akan mengalami kerugian. Dan untuk menutupi kerugian tersebut pemilik barang memohon barangnya dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian pemilik barang menjual kepada pelaku usaha lain dengan cara menghutangkan sehingga akan mendapat harga jual yang diharapkan dan akan membayar hutangnya di Bank BJB sebelum jatuh

tempo.

Adanya jaminan secara lisan oleh pemilik barang kepada Pengelola Gudang akan melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo SRG. Adanya hubungan histori antara Pengelola Gudang SRG dengan pemilik barang baik Pengelola Gudang sebagai pembeli maupun dalam kerjasama sebagai corporate farming.

Langkah-langkah yang Tim lakukan di lapangan yaitu, menegur Pengelola Gudang SRG beserta jajarannya, mengapa terlalu ceroboh mengeluarkan komoditi yang masih jadi jaminan dan belum dilunasi pinjamannya. Meminta Pengelola Gudang SRG dan jajarannya untuk segera menghubungi pemilik barang dari 38 RG tersebut untuk segera melunasi kewajibannya di Bank BJB dan setiap minggu melaporkan kepada Bappebti.

Selain itu, memberikan penjelasan dan arahan di lapangan terkait resiko-resiko yang mungkin terjadi, apabila pemilik barang tidak melunasi kewajibannya di bank pada saat jatuh tempo, resiko gagal bayar termasuk resiko Pengelola Gudang SRG dan Gudang SRG terhadap sanksi yang akan diberikan Bappebti sebagai Badan Pengawas SRG.

Mengingat Pengelola Gudang SRG Tukdana-Indramayu telah melakukan kesalahan yang bersifat sangat berat yaitu mengeluarkan barang sebelum pelunasan RG dan ini merupakan kejadian yang kedua kali, dimana sebelumnya pernah dilakukan pada gudang SRG di Subang, maka Tim melakukan langkah-langkah penindakan untuk memberikan efek jera. Tindakan yang dilakukan yakni, memberi surat teguran dan memanggil Direktur Utama PT. Pertani untuk memberikan penjelasan terkait dengan temuan di Gudang SRG Tukdana-Indramayu tersebut. Di samping itu, mempertimbangkan dilakukan sanksi administratif berupa pembekuan sementara terhadap Gudang SRG milik PT. Pertani di Tukdana Indramayu, hingga semua RG yang bermasalah melunasi kewajibannya di bank. 📌



Kepala Bappebti Sutriyono Edy memberikan arahan terkait Sistem Koneksi Registrasi dan Transaksi Kopi secara elektronik yang terkoneksi dengan bursa dan Intrade kepada Pelaku usaha di Lampung. Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Bappebti, Direksi Bursa Berjangka, serta Pelaku Usaha Kopi. **Lampung, 30 Januari 2014.**



Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengunjungi dan memberikan bantuan untuk korban gempa Gunung Sinabung di beberapa posko pengungsian di Kota Kabanjaha Kabupaten Tanah Karo Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut Mendag didampingi oleh Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendag yang berkerjasama dengan Forum Futures Peduli memberikan bantuan berupa 5 truk bahan pangan. **Sumut, 20 Januari 2014.**



Kepala Bappebti, Sutriyono Edy menyaksikan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti Kemendag yaitu Sekretaris Bappebti dari Robert James Bintaryo kepada Junaedi, selanjutnya Robert James Bintaryo diamanahkan sebagai Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Pada saat yang sama dilakukan juga Serah Terima Jabatan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa dari Ismadjaja Tungkagi kepada Pantas Lumban Batu, dimana Ismadjaja Tungkagi telah memasuki masa purna tugas. **Jakarta, 3 Januari 2014.**



Kepala Bappebti, Sutriyono Edy melakukan kunjungan kerja ke Gudang Pembenihan Gabah dan Beras PT Pertani (UPB Munggu), Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Gudang tersebut rencananya akan dijadikan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah mendapat persetujuan Kepala Bappebti sebagai salah satu gudang SRG. **Bali, 15 Januari 2014.**



Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, menjelaskan pentingnya bagi mahasiswa/i atau generasi penerus bangsa untuk mempersiapkan diri dalam menyambut AEC 2015 yang nantinya akan menjadi sarana perekonomian di tingkat ASEAN. Dalam kesempatan tersebut Menteri Perdagangan di dampingi Dirjen SPK Widodo dan Kepala BAPPEBTI Sutriyono Edy dan Rektor Universitas Sumatera Utara Syahril Pasribu. **Medan, 8 Januari 2014.**



Kepala Bappebti, Sutriyono Edy menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara Presentasi Perkembangan Perdagangan Ekspor Timah melalui Bursa. Acara dihadiri oleh Kepala Bappebti, Pejabat Eselon II dan III Bappebti Kemendag, Ditjen Daglu Kemendag, Perwakilan Kementerian ESDM, Direksi PT BKDI, Direksi PT ISI, Surveyor Indonesia, PT BGR. **Jakarta, 9 Januari 2014.**



Dinyatakan Pailit Izin Usaha CAF Dicabut

PT. Central Asset Futures (CAF) sejak 1 September 2010 diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnisnya. Terkait keputusan Pengadilan Niaga tersebut, otoritas perdagangan berjangka per 27 Januari 2014, juga mencabut izin usaha CAF. Pencabutan izin usaha oleh Bappebti itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No.. 01/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/01/2014.

Sedangkan keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam keputusannya No. 55/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst, tertanggal 1 September 2010, CAF dinyatakan pailit karena tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis dengan baik.

Menurut Kepala Biro Hukum, Bappebti, Sri Haryati, sejatinya pihak

manajemen CAF sudah diberi waktu untuk melakukan perbaikan dengan dikeluarkannya pembekuan izin usaha. Namun, dalam jangka waktu yang diberikan Bappebti itu, manajemen CAF tidak melakukan langkah-langkah perbaikan.

"Sebenarnya sejak Pengadilan Niaga mengeluarkan keputusannya, Bappebti sudah harus mengambil sikap tegas. Namun, karena ada permohonan dari pihak manajemen untuk melakukan perbaikan, maka Bappebti memberi waktu. Tetapi setelah melewati batas yang ditetapkan, Bappebti pun mengambil tindakan tegas," ujar Sri Haryati.

Lebih jauh dikatakan Sri Haryati, pencabutan izin usaha CAF itu tidak menghilangkan atau menghapus tanggungjawab perusahaan terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan

kerugian bagi nasabah. "Seandainya masih ada nasabah CAF yang merasa dirugikan, Bappebti selaku otoritas akan siap membantu penyelesaiannya."

Selain mencabut izin usaha, Bappebti juga semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Central Asset Futures.

Menyusul keputusan Bappebti itu, Jakarta Futures Exchange (JFX) juga mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Central Asset Futures. Dengan pencabutan keanggotaan bursa ini, JFX juga memutuskan bahwa manajemen CAF tetap bertanggungjawab atas kewajiban keuangan yang timbul kepada nasabah, bursa, lembaga kliring, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka melalui Bursa serta tidak menghapus konsekuensi yang timbul atas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh CAF.

Wajah Baru Pejabat Bappebti 2014



Rotasi pejabat Kementerian Perdagangan yang dilakukan atas keputusan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, beberapa waktu lalu, juga terjadi di Bappebti. Sekretaris Bappebti yang semula dijabat Robert James Bintaryo, digantikan oleh Junaedi yang sebelumnya menjabat Direktur Fasilitas Ekspor Impor, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Sementara itu, Robert James Bintaryo, mengisi jabatan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan.

Pisah sambut pejabat Bappebti itu diselenggarakan pada 23 Januari 2014 di Gedung Bappebti. Dan dalam kesempatan itu, Kepala Bappebti Sutriyono Edi, serta pejabat Eselon II Bappebti lainnya, ikut menyaksikan serah terima jabatan itu.

Di samping itu, jabatan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa yang semula dijabat Ismadjaja Tungkagi, digantikan oleh Pantas Lumban Batu. Hal itu dikarenakan Ismadjaja Tungkagi per Januari 2014 sudah memasuki masa purna tugas. Pantas Lumban Batu adalah pejabat yang tidak asing di lingkungan Bappebti, dan telah mengisi berbagai posisi penting Bappebti.

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam pesannya saat serah terima jabatan itu dilakukan, mengatakan, pengabdian kepada negara adalah sebuah amanah yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. "Bappebti dalam menjalankan tugasnya cukup banyak bersentuhan pada kepentingan masyarakat, baik di pedesaan maupun di pusat kota. Hal itu dikarenakan Bappebti memiliki fungsi membina dan mengawasi instrumen pasar lelang, sistem resi gudang yang ada di daerah dan bursa berjangka di lbukota," katanya.

Toko Modern Wajib Pasarkan 80 % Produksi Lokal

Kementerian Perdagangan mewajibkan toko modern memasarkan produk dalam negeri minimal 80 % dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. "Ini untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam sebuah kesempatan di bulan Januari 2014 di Jakarta.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

"Ini untuk memudahkan produsen dalam negeri dan UKM mendapatkan akses," jelas Gita.

Gita menambahkan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern tumbuh dengan pesat. Sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 2006 menunjukkan bahwa pendapatan seluruh pelaku usaha eceran di Indonesia dalam setahun tercatat Rp 234 triliun. Apabila setiap tahun usaha eceran tersebut tumbuh 7 %, maka seluruh usaha eceran pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai Rp 375 triliun.

Menurut Gita, nilai sebesar itu selayaknya perlu dikelola dengan baik agar dapat terdistribusi secara merata. "Dengan begitu, pada gilirannya, produk Indonesia dan



para pengusaha UKM akan dapat turut menikmati nilai tersebut secara proporsional."

Meskipun Permendag yang baru dikeluarkan ini memiliki beberapa pasal pengaturan baru, pasal-pasal tersebut tidak akan diberlakukan secara retroaktif. Untuk itu, masih akan ada tenggang waktu selama 2,5 tahun untuk melakukan sosialisasi secara intensif guna mengurangi

kekhawatiran para pelaku usaha yang sudah telanjur membuat usaha sebelum terbitnya peraturan ini.

Di pihak lain, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Srie Agustina, menjelaskan, Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013, diterbitkan setelah melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihak yang terlibat dalam pembahasan Permendag ini antara lain Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Asosiasi Produsen/Pemasok, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia serta para pemangku lainnya.

Srie Agustina menambahkan, dua hal penting lain yang diatur dalam Permendag ini yakni jumlah outlet/gerai toko modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150. "Lalu, aturan tentang kewajiban pusat perbelanjaan dalam menyediakan atau menawarkan counter image atau ruang usaha untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri," katanya.

Kemendag Tetapkan HBP Kedelai

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, mengungkapkan produksi kedelai perlu didorong dengan cara memberikan insentif melalui kebijakan harga di tingkat petani. Hal tersebut berguna untuk mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

Menurut Mendag, saat ini kebutuhan kedelai nasional masih cukup besar namun memiliki ketergantungan terhadap impor yang masih cukup tinggi sekitar 60 % - 70 %.

"Insentif harga diberikan dalam bentuk penetapan Harga Beli Petani (HBP) Kedelai yang ditentukan dengan mempertimbangkan biaya usaha tani kedelai, dampak terhadap tingkat inflasi dan keuntungan petani. HBP Kedelai merupakan harga acuan pembelian kedelai di tingkat petani yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan," kata Gita, di Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 84/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai di Tingkat Petani diterbitkan pada tanggal 31



Desember 2013 lalu. Terkait itu, HBP kedelai periode Januari-Maret 2014 ditetapkan sebesar Rp. 7.500,-/kg.

"Dengan kebijakan harga pembelian kedelai kepada petani saat ini, semangat para petani kita untuk menanam kedelai akan tetap terpelihara, yang pada gilirannya akan dapat menstimulasi peningkatan produktivitas tanaman kedelai," kata Gita Wirjawan.

Dongkrak Harga, Pengusaha dan Petani Karet Sepakat Pangkas Produksi 10 %



Pengusaha dan petani karet alam Indonesia sepakat menurunkan produksi 2014 sebesar 318.029 ton atau 10 % dari total produksi tahun ini yang diprediksi 3,18 juta ton. Penurunan produksi tersebut diharapkan mengurangi pasokan karet alam Indonesia ke pasar global.

Dampaknya, suplai pun menurun yang diharapkan mendongkrak harga karet di pasar internasional kembali di atas US\$ 3 per kg. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Daud Husni Bastari, mengungkapkan, himbauan telah disampaikan pada para petani karet sejak akhir 2013 untuk diimplementasikan mulai Januari 2014. Upaya itu dilakukan karena harga karet alam sampai akhir tahun lalu tidak beranjak dari kisaran US\$ 2,30-2,50 per kg. Harga yang begitu rendah membuat buntung para pengusaha dan terlebih petani karet yang saat ini menguasai 87 % perkebunan di Indonesia.

Dengan pengurangan frekuensi tersebut, petani tetap bisa menyadap karet setiap harinya, hanya saja tidak semua kebun karet disadap pada waktu yang sama. Contohnya, petani karet memiliki 600 pohon karet yang bisa disadap, untuk pengurangan produksi 10 %, setiap harinya hanya 300 pohon saja yang harus disadap.

"Atau misalnya ada tiga lokasi kebun, penyadapan dilakukan dalam dua waktu yang berbeda atau diselang-seling harinya, sehingga setiap hari petani tetap memiliki kegiatan penyadapan dan tidak ada penyetopan kegiatan di kebun karet," pungkas Daud.

Produksi Kakao 2014 Ditargetkan Capai 1,1 Juta Ton



Gamal Nasir, mengatakan, salah satu upaya peningkatan produksi tersebut yakni dengan melanjutkan program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao (Gernas Kakao) pada 2014.

"Dengan pelaksanaan gernas kakao ini produksi kakao nasional didorong menjadi nomor dua di dunia dengan target sebesar 1,1 juta ton," kata Gamal, beberapa waktu lalu.

Gamal mengatakan program Gernas Kakao telah dilaksanakan pada 2009-2011 dengan kucuran anggaran sekitar Rp 3 triliun serta cakupan areal 400 ribu hektare atau 27 % dari luas perkebunan kakao 1,6 juta ha saat ini.

Menurut Gamal, hasil produksi kakao yang diikutkan dalam program Gernas tersebut baru akan terlihat setelah empat tahun dari pelaksanaannya, namun saat ini tanamannya sudah mulai berbuah.

Untuk itu, tambah Gamal Nasir, pihaknya juga akan melakukan pembinaan petani ke daerah-daerah dengan alokasi anggaran sekitar Rp 200 miliar. Pada 2013 ekspor kakao Indonesia mencapai 295,9 ribu ton dengan nilai US\$ 794,8 juta menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 388,0 ribu ton senilai US\$ 1,05 miliar pada 2012.

Prospek Industri Kelapa Sawit 2014 Cukup Cerah



Industri sawit nasional pada tahun 2014 masih menjadi andalan, motor penggerak dan sekaligus penyelamat perekonomian nasional, terutama pada saat perekonomian negara masih dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama defisit neraca transaksi berjalan yang terus berlangsung walaupun secara bertahap menurun.

Menurut para ahli, di tahun 2014 produksi akan meningkat sementara permintaan dunia belum sepenuhnya pulih dan normal. Karenanya kebijakan beberapa negara terutama Indonesia dan Malaysia yang akan meningkatkan konsumsi dalam negeri biofuelnya akan menjadi faktor yang akan menentukan perkembangan kelapa sawit di tahun 2014.

Diperkirakan Indonesia akan menambah pasokan konsumsi CPO sebesar 3,3 juta ton untuk produksi biofuels. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan insentif dan regulasi yang kondusif. Momen ini menjadi peluang bagi minyak sawit untuk berperan lebih besar dalam perekonomian.

Namun demikian, GAPKI berpendapat, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, seperti kepastian hukum tentang tata ruang yang mutlak dibutuhkan agar rencana usaha dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Mendorong penggunaan CPO di dalam negeri melalui percepatan implementasi bahan bakar nabati nasional. Seperti, memberlakukan mandatori penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis CPO sebesar 10 % yang dicampurkan dengan solar.

JFX launched 3 new products

Jakarta Futures Exchange (JFX) on the 20th of December 2013 launched 3 new products for multilateral futures contract, with are coffee futures contract, gold futures contract and physical rubber market contract.

JFX main director, Sherman Rana Kresna explained that futures contract that launched by JFX is the variant of coffee futures contract for Arabica coffee and Robusta coffee. For the Arabica, the contract unit is 2 tons (2000 KG) with Arabica Coffee's SNI quality grade 1 for Arabica coffee (No.01-2907-2008) as per National Standardization Bureau's standard.

And for Robusta Coffee, the contract unit is 5 tons (5000 KG) with the Robusta Coffee's SNI quality grade IV-B (NO. 01-2907-2008).

"Coffee futures contract is not a new thing in Indonesia as all this time the business players has done lots of transaction at foreign exchange. However, JFX packed the coffee contract better to accommodate all market demands," Sherman's said.

Besides that, JFX also launched gold contract in smaller gram unit. With the contract size of 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram and 100 gram. "This contract will give a choice for society to have gold investment," Sherman said.

The other JFX new product is physical rubber market with the contract size of 5 tons (5000 / KG) with



the minimum price change is IDR 10 per KG. The type of physical rubber market delivery is Loco warehouse sellers or Franco warehouse buyer. For the rubber quality in market is Bokar (smallholder rubber process materials) with the dry rubber content (K3) minimum 50%. According to Sherman, JFX physical rubber market already has 6 participants consisting of 1 buyer participant and 5 seller participants. The buyer participant is PT Kebun Makmur Sejahtera and the seller participants are 1 Farmer cooperatives, 1 farmer group and 3 individual traders.

JFX physical rubber market is still concentrated in Balikpapan, Samarinda and Palembang. In next year 2014, JFX has set target to gather all existing physical rubber market in Jambi, North Sumatra, Riau and other area.

"Our target on JFX rubber transaction volume in 2014 is to reach 44.000 ton per annual therefore we also target to have 300 seller participants and 30 buyer participants," Sherman Rana Kresna emphasized.

Local broker is still not ready to compete

The Indonesian futures broker company has not yet ready to compete with foreign broker company either on capital side, human resources or teknologi usage. With the opened chance for foreign futures broker company to operate in Indonesia, for sure it will be specter for local players.

Thus one of Jakarta Futures Exchange (JFX) Director, Bihar Sakti Wibowo's response in regards to coordination meeting result between the ministries and agencies at Ministry

of Economic office on Tuesday the 24th of December 2013. On that meeting it was dicided that foreign broker company can have 95% of futures broker company's shareholdings.

"It is certain, that government policy has to become the warning for local futures broker company. They has to work harder for that. If they are not, the foreigner will dominate this industry. As from the capital side, human resources and teknologi, the foreigner is certainly more ready than us," Bihar explained.

However, Bihar expected that Coftra as the regulator of futures trading industry in Indonesia can protect local company. "Coftra still has authority to organize them the foreign broker company. Therefore Coftra has to create technical policy to set a border."

"But there is a positive side of the influx of foreign broker company to Indonesia to increase exchange liquidation and bring competition up so our local broker company will be much better." Bihar Sakti Wibowo said.

**PEMBIAYAAN RESI GUDANG
BULAN SEPTEMBER 2013**

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI				
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	3	1.546.000.000	Bank Jatim
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Gabah	2	1.386.500.000	Bank Jatim
		Jagung	1	612.500.000	Bank Jatim
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	27	2.014.500.000	Bank BJB
2.	PT. BHANDA GHARA REKSA				
	- Barito Kuala*	Gabah	2	92.900.000	Bank Kalsel
3.	KOPERASI NIAGA MUKTI				
	- Cianjur*	Gabah	9	1.234.850.000	Bank BJB
	JUMLAH	Gabah	43	6.274.750.000	
		Jagung	1	612.500.000	
	TOTAL		44	6.887.250.000	

**PENERBITAN RESI GUDANG
BULAN SEPTEMBER 2013**

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp/kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	3	495	4.600	2.277.000.000
	- Sidrap	Beras	1	130	6.800	884.000.000
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Gabah	2	435	4.554	1.981.000.000
		Jagung	1	250	3.500	875.000.000
	- Ngawi	Gabah	1	20	12.000	240.000.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	28	508	6.132	3.117.772.500
	- Sumedang (Tomo)	Gabah	2	50	5.000	250.000.000
2.	PT. BHANDA GHARA REKSA					
	- Barito Kuala*	Gabah	12	118,332	5.000	591.610.000
3.	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Cianjur*	Gabah	9	290	15.750	1.770.000.000
	JUMLAH	Gabah	57	1916,81	7.576	10.227.382.500
		Beras	1	130	6.800	884.000.000
		Jagung	1	250	3.500	875.000.000
	TOTAL		59	2.296,81		11.986.382.500

*) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota
*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

**INDIKATOR HARGA PLKA
BULAN OKTOBER 2013**

NO.	DERAH	KOMODITI	JENIS	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	GUDANG SERAH
1.	Bali / 20 Oktober 2013	PISANG	Batang Pisang Batu	Rp. 6.000,-/Batang	Rp. 6.000,-/Batang	Payangan - Bali
		BABI	Bibit	Rp. 480.000,-/Ekor	Rp. 480.000,-/Ekor	Denpasar - Bali
		SAPI	Pejantan	Rp. 33.000,-/Kg	Rp. 33.000,-/Kg	Negosiasi
2.	Gorontalo / 26 Oktober 2013	KAYU MANIS	Lokal	Rp. 8.000,-/Kg	Rp. 8.000,-/Kg	Gorontalo
		GAPLEK	Standar	Rp. 2.750,-/Kg	Rp. 2.750,-/Kg	Negosiasi
		BERAS	IR 64 Setra	Rp. 7.500,-/Kg	Rp. 7.500,-/Kg	Gorontalo
		JAGUNG	Pipilan Kering	Rp. 2.800,-/Kg	Rp. 2.800,-/Kg	Gorontalo
3.	Jambi / 11 Oktober 2013	KEDELAI	Lokal	Rp. 8.500,-/Kg	Rp. 8.500,-/Kg	Jambi
		KARET	Lump	Rp. 13.700,-/Kg	Rp. 13.700,-/Kg	Jambi
4.	Bandung / 17 Oktober 2013	TELUR AYAM	Broiler	Rp. 15.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg	Bandung
5.	Sidoarjo / 24 Oktober 2013	KOPI	Robusta	Rp. 29.000,-/Kg	Rp. 29.000,-/Kg	Surabaya
		KACANG TANAH	Basah Hibrida	Rp. 6.000,-/Kg	Rp. 6.000,-/Kg	Jakarta Timur
6.	Makassar / 23 Oktober 2013	KOPI	Arabika	Rp. 55.000,-/Kg	Rp. 55.000,-/Kg	Makassar

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

TRANSAKSI PASAR LELANG

NO.	DAERAH	NILAI TRANSAKSI 2013 (Rp.)	
		OKTOBER	NOVEMBER
1.	Sumatera Barat	757.940.000	1.801.690.000
2.	Jambi	3.063.700.000	3.216.800.000
3.	Lampung	-	2.777.000.000
4.	Jawa Barat	18.912.800.000	10.636.000.000
5.	Jawa Tengah	12.444.500.000	8.395.000.000
6.	Yogyakarta	8.614.800.000	50.279.000.000
7.	Jawa Timur	-	34.086.500.000
8.	Bali	-	-
9.	NTB	4.146.850.000	-
10.	Sulawesi Utara	28.878.750.000	19.231.350.000
11.	Sulawesi Selatan	609.000.000	1.807.000.000
12.	Sulawesi Tenggara	-	1.517.290.000
13.	Gorontalo	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-
	TOTAL	130.530.182.500	133.747.630.000
	GRAND TOTAL JANUARI – OKTOBER	961.831.792.100	

10 BESAR KOMODITI PASAR LELANG PERIODE OKTOBER 2013

NO.	KOMODITAS	VOLUME/TON	TOTAL/RP
1.	Beras	3.775	30.088.600.000
2.	Jagung	7.491	22.827.800.000
3.	Tepung Ikan	100	3.721.000.000
4.	Tepung Protein	50	14.500.000.000
5.	Sapi	270	9.720.000.000
6.	Cengkeh	183	6.067.890.000
7.	Kentang	1.112	6.063.300.000
8.	Cabe	205	3.375.000.000
9.	Kencur	785	3.131.000.000
10.	Jahe	361	2.816.500.000

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

7 Mata Uang Terkuat di Dunia

Investasi mata uang asing saat ini menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan keuntungan besar. Namun untuk berinvestasi diproduk-produk keuangan- mata uang asing, sangat perlu mengetahui karakter dari mata uang asing tersebut. Salah satu aspek penting yang harus diketahui adalah keamanan dari nilai mata uang asing tersebut.

Bagi investor pemula atau yang memiliki dana terbatas, sangat tidak disarankan berinvestasi pada produk keuangan yang berfluktuasi tinggi. Tetapi pilihlah mata uang asing yang suku bunganya relatif rendah.

Mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan sejumlah mata uang Eropa tidak disarankan bagi investor pemula atau investasi untuk tujuan jangka panjang. Sejumlah mata uang asing itu lebih cocok bagi investor yang siap mengambil risiko.

Berikut ini tujuh mata uang asing yang aman untuk investasi jangka panjang dan cocok bagi investor pemula;



7. Won- Korea

Pertimbangannya. Korea Selatan saat ini telah menjelma menjadi sebuah negara besar di industri manufaktur. Kualitas produk-produk Korea seperti Samsung Electronics, Hyundai dan Posco telah menjadi pesaing ketat produk Jepang. Terlepas dari nilai yen yang lemah, Korea Selatan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan Jepang. Kesehatan fiskal Korea Selatan juga kuat dengan utang 35 % terhadap PDB, pertumbuhan PDB 3,3 %, dan surplus neraca perdagangan sebesar 3,8 %.



6. Ringgit- Malaysia

Pertimbangannya. Malaysia sejak kemerdekaannya tahun 1957, menjadi salah satu negara yang belum pernah gagal mempertahankan tingkat inflasi tahunannya di atas 20 %. Bank sentral Malaysia pun memiliki *track record* yang sangat baik dalam menjaga inflasi yang rendah dan ekspor minyak mentah, minyak kelapa sawit, mineral, dan sumber daya alam lainnya menjaga cadangan devisa diisi dengan baik. Hanya saja sejak tahun 1997, pasca krisis keuangan melanda kawasan Asia, pemerintah Malaysia sangat mengontrol investor asing untuk menguasai Ringgit Malaysia.



5. Krone- Norwegia

Pertimbangannya. Norwegia memiliki mata uang yang paling stabil di Eropa. Dengan ekspor minyak, standar hidup yang tinggi, surplus perdagangannya mencapai 13 %, dan perbandingan hutang terhadap PDB hanya 28 %. Pemerintah Norwegia juga sangat baik di dalam mempertahankan kekuatan mata uang dan menekan masalah-masalah struktural yang terjadi di benua Eropa. Norwegia merupakan salah satu negara di Eropa yang tidak bergabung di Uni Eropa, sehingga negara ini dapat berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi investor.



3. Dolar- Hong Kong

Pertimbangannya. Dolar Hong Kong seperti call option mata uang. Hal ini dikarenakan dolar Hong Kong dipatok pada sempit terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga risiko downside terbatas. Namun, jika tekanan perdagangan dan dolar yang lemah, dolar Hong Kong akan memiliki potensi apresiasi yang lebih besar dari 20 % untuk mencocokkan keuntungan baru-baru ini renminbi terhadap dolar AS.



2. Dolar- Singapura

Pertimbangannya. Dengan meningkatnya pengungkapan dana-dana ilegal disimpan disejumlah lembaga keuangan Swiss, membuat Singapura menjadi salah satu pusat perdagangan global mata uang asing. Dan menariknya, kebijakan negara ini membebaskan pajak bagi pemilik dana, sehingga menjadi salah satu faktor pematik bagi investor asing. Selain kebijakan pemerintah Singapura tersebut, negara singa ini juga memiliki surplus perdagangan sekitar 18 %. Singapura juga menikmati manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Asia.



4. Renminbi- Tiongkok

Pertimbangannya. Tiongkok saat ini adalah negara yang masuk dalam peralihan dari negara berbasis produksi untuk tujuan konsumsi menjadi negara berorientasi ekspor. Sebab itu, masa transisi ini akan menjadikan apresiasi terhadap mata uang renminbi sebagai daya beli domestik yang lebih tinggi dari barang impor seperti makanan dan energi akan dibutuhkan untuk meningkatkan konsumsi kalangan berpenghasilan menengah di Tiongkok. Sebab, masyarakat berpenghasilan tinggi itu akan mengeluarkan uang untuk barang dan jasa konsumen lokal. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga memiliki cadangan devisa dan surplus perdagangan yang tinggi sehingga dapat menahan nilai tukar renminbi. Di samping itu, Pemerintah Tiongkok juga melakukan intervensi manakala nilai tukar renminbi turun.



1. Dolar- Selandia Baru

Pertimbangannya. Nilai dolar Selandia Baru adalah mata uang asing yang paling aman dari enam mata uang asing lainnya. Bank sentra Selandia Baru juga merupakan salah satu bank sentral yang paling maju di dunia. Selain itu, bank sentral dalam waktu dekat ini sedang merencanakan menaikkan suku bunga dan mereformasi sektor perpajakan dengan penurunan tarif. *) *Dari berbagai sumber*

Pengalaman India Integrasi Pasar Spot dan Bursa Berjangka

Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian India. Meskipun kontribusinya sekitar sepertujuh terhadap PDB, sektor pertanian hampir menyerap setengah dari lapangan kerja di India. Jumlah petani kecil dan marginal mencapai 80 % dari kepemilikan lahan pertanian dan menghasilkan lebih dari setengah dari total output pertanian. Sebab itu, kebijakan pemerintah berorientasi pada pemasaran hasil pertanian sehingga memberi nilai lebih bagi pemilik lahan pertanian.



R. Ramaseshan, CEO, NCDEX Spot Exchange Limited, India.

Kelangkaan pangan yang terjadi di tahun 1950, menyebabkan pemerintah India melarang transaksi derivatif komoditas pertanian. Karena itu pemerintah mengembangkan pasar spot. Hal ini juga selaras dengan kebutuhan untuk mendukung petani kecil dan marginal, yang memiliki lahan terbatas. Dengan kebijakan itu, pemerintah India mendirikan pasar dengan fasilitas penyimpanan dan pasar lelang produk pertanian. Setiap pasar lelang yang didirikan pemerintah India itu, dijadikan tolak ukur perdagangan produk lokal. Dengan kualitas produksi yang tinggi, para petani akhirnya memperoleh harga yang lebih baik dari pasar lelang yang transparan.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah India untuk meningkatkan kualitas transaksi pasar lelang spot tersebut. Semula penawaran harga komoditi melalui formulir, lalu diinput ke komputer untuk mengetahui penawaran harga tertinggi.

Dengan beroperasi berbagai pasar lelang tersebut, sekitar 10 tahun lalu pemerintah India juga mendirikan bursa derivatif komoditas di lingkungan pasar lelang. Dan seluruh pasar lelang tersebut terkoneksi ke seluruh

wilayah India melalui internet. Meski kedua pasar ini saling berbeda, tetapi kemudian bursa komoditi menjadi acun harga di tingkat nasional India. Dengan demikian, NCDEX dan anak perusahaan yang mengoperasikan pasar spot- NCDEX Spot Efek, menjadi setara baik dalam proses penentuan harga maupun sistem teknologi yang digunakan.

Pasar spot merupakan asimetri informasi di mana penjual memiliki pengetahuan penuh dari hasil yang ditawarkan untuk dijual dan pembeli mengharapkan informasi harga yang lebih baik bagi dirinya. Jadi intervensi di pasar hanya pada transparansi harga dalam operasi pasar dan penyebaran informasi. Terobosan ini datang ketika NCDEX Spot berhasil meyakinkan salah satu negara bagian di selatan India yang menghubungkan pasar spot-nya. Kemitraan antara swasta dan pemerintah ini merupakan inovasi yang canggih dengan disain sistem lelang yang dapat memantau setiap pasar secara *real time*. Dan di sisi lain, kemitraan ini dapat menekan biaya investasi serta lebih efisien.

Perubahan mekanisme pasar lelang tersebut pada akhirnya



membawa perubahan besar bagi pelaku pasar lelang. Tantangannya hanya pada mengedukasi pelaku dengan sistem yang lebih baru. Sebab itu, penurus NCDEX Spot secara bertahap melakukan pelatihan kepada pejabat pasar, pedagang dan peserta pasar lelang lainnya. Pelatihan itu juga merupakan momen untuk menampung saran dari peserta pasar akan perlunya perbaikan sistem lelang.

Pasar spot pertama dengan mekanisme perdagangan terbaru didirikan pada Desember 2011, dan dalam tempo 15 bulan kemudian bergabung sebanyak 20 pasar lelang yang semuanya terkoneksi internet.

Dalam waktu dekat ini pun, NCDEX Spot akan memperluas sistem lelang online di 30 pasar lelang. Dengan terkoneksi berbagai pasar lelang itu, maka hampir setengah dari hasil pertanian di negara bagian India akan dipasarkan melalui pasar lelang.

Keberhasilan NCDEX Spot mengembangkan sistem pasar lelang telah mendorong pemerintah negara-negara bagian di India untuk terkoneksi dengan bursa. Hal itu dikarenakan pasar spot yang telah ada membawa inovasi-inovasi baru baik bagi pedagang maupun petani

dalam menghasilkan komoditi yang berdaya saing dan mendapatkan harga yang terbaik. Selain itu, dengan ditampilkannya berbagai komoditi hasil pertanian di pasar spot melalui digital, sangat dimungkinkan interaksi penawaran dan permintaan dari daerah lain.

Jika partisipasi lintas pasar tersebut dapat dimungkinkan, maka gudang penyimpanan komoditas juga bisa dikaitkan dengan pasar yang lebih luas, sehingga menciptakan pasar virtual untuk komoditas yang terdiri dari pasar fisik pergudangan. Dengan perdagangan komoditas model ini, pembeli tidak perlu memeriksa komoditi yang akan dibelinya, karena NCDEX Spot Exchange telah menjamin semua proses jual-beli sesuai dengan yang dijanjikan atau yang ditampilkan di layar perdagangan.

Namun demikian, pihak bursa membatasi lokasi pengiriman komoditas yang sudah ditransaksikan. Dan di sisi lain, pihak bursa juga mengakomodasi perbedaan kualitas di lokasi yang berbeda namun sebelumnya komoditi tersebut sudah dilakukan lindung nilai dalam kontrak derivatif. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dalam kontrak

berjangka dan membuat kontrak lebih likuid dan harga yang ditemukan di bursa berjangka menandakan perilaku harga di pasar spot.

Dari pengalaman penulis, mengembangkan infrastruktur perdagangan komoditi di pasar spot, sistem resi gudang dan bursa berjangka, pada dasarnya sangat sulit bagi negara berkembang. Namun dengan edukasi yang terus menerus dan dilandasi disain pasar yang jelas, pada akhirnya para pelaku pasar bisa menerima apa mekanisme perdagangan komoditi yang diciptakan bursa berjangka.

Sebab itu, dalam pengembangan tiga pasar tersebut di India, bursa berjangka lebih realistis dengan keadaan para pelakunya. Disain pasar dari negara maju belum tentu bisa berhasil diterapkan di negara berkembang.

Umumnya negara berkembang hanya berusaha memperkuat sektor pertanian mereka dengan menyelenggarakan pasar fisik dan kemudian mempertimbangkan investasi untuk menciptakan infrastruktur pasar yang transparan, mudah diakses dan membuat informasi harga yang tersedia bagi semua pemangku kepentingan. Jika tahapan ini bisa dilampaui, kemudian menciptakan pasar derivatif lainnya seperti kontrak berjangka dan opsi. Kunci sukses perubahan-perubahan pasar itu hanya bisa terjadi jika semua pemangku kepentingan berkelanjutan melakukan dialog, edukasi dan sosialisasi.

Terakhir, negara-negara berkembang seperti India dapat memanfaatkan pengalaman ini agar lebih cepat mengimplementasikan sinergitas tiga pasar tersebut. Sebab itu, NCDEX akan bersedia berbagi pengalaman ini bagi siapa pun untuk bisa menerapkan inovasi pasar spot yang terintegrasi dengan pasar derivatif. *Sumber; Swiss Derivatives, Edisi 52, 2013*

Rizal Tua Hutasoit

Jangan Pandang Sebelah Mata Tenaga Marketing

Tenaga marketing di sebuah perusahaan pialang memiliki peran yang sangat strategis. Bahkan, Direktur PT Trijaya Pratama Futures (TPF), Rizal Tua Hutasoit, mengakui, keberhasilan TPF dalam mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu perusahaan pialang yang cukup terkemuka di Indonesia berkat kerja keras tenaga marketing.

"Kami mampu bersaing di industri PBK (perdagangan berjangka komoditi) dan berkembang hingga memiliki tujuh kantor cabang dan kantor pusat, tidak terlepas dari peran tenaga marketing. Karena itu, jenjang karier marketing di Trijaya (TPF) sangat jelas dan transparan," ungkap Rizal kepada **Buletin Berjangka**, di kantornya, Jl. Gatot Soebroto Kav 9-11, Lantai 9, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rizal mengatakan, Direksi TPF sangat memperhatikan tenaga marketing yang berprestasi. Dan, bagi yang berprestasi akan diberi jabatan untuk mengisi kantor-kantor cabang TPF.

"Kami akui, tenaga marketing di Trijaya dididik dengan keras, sehingga memahami betul bisnis perdagangan berjangka. Selain itu, loyalitas marketing terhadap perusahaan sangat dihargai. Karenanya, perusahaan mendukung semua aktifitas mereka," terangnya.

TPF adalah salah satu perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) sejak tahun 2004. Di tahun 2009, pialang ini juga menjadi anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). TPF semula berkantor pusat di Medan, Sumut. Namun, sesuai dengan perkembangan perusahaan TPF merambah Jakarta dan kantor yang ada di Kota Medan menjadi salah satu kantor cabang.



//
Jenjang karier marketing di Trijaya sangat jelas dan transparan
 //

"Jadi, sejak awal berdirinya perusahaan ini, kami sudah menerapkan manajemen terbuka dan kekeluargaan. Berbagi pengalaman selalu dikedepankan. Seorang tenaga marketing yang tidak berkembang, permasalahannya dipecahkan bersama dengan yang sudah berpengalaman. Itu sebabnya, tenaga marketing yang berasal dari Trijaya pasti berhasil di perusahaan lain," kata pria berdarah Batak ini.

Sebab itu, Trijaya tidak pernah menerima tenaga marketing yang sudah pernah bergabung di perusahaan lain. Karena, salah satu misi kami selain berbisnis juga menciptakan SDM yang profesional di bidang perdagangan berjangka. Itulah membedakan kami dengan perusahaan pialang lainnya.

Ayah dari tiga anak ini menuturkan, membangun loyalitas tenaga marketing tidak hanya diukur dari sisi income yang diperoleh. Tetapi juga kenyamanan mereka bekerja. Karena itu, setiap awal bulan kami menyelenggarakan ibadah persekutuan doa bagi beragama Kristen. Sedangkan yang beragama Islam, di hari raya besar diselenggarakan berbagai kegiatan. "Kegiatan seperti itu selain mengikat rasa kekeluargaan juga memperpendek jarak antar manajemen dengan karyawan."

"Secara reguler kami juga mengunjungi panti asuhan dan komunitas yang layak dibantu. Dari seluruh karyawan dikumpulkan dana sukarela, lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan," sambung Rizal.



Mantan Lawyer

Alumnus Fak. Hukum Univ. Panca Budi, Medan, 1997 ini, menuturkan, berkecimpung di bidang perdagangan berjangka diawali perkenalannya dengan salah satu pengurus TPF.

"Ketika itu saya masih berprofesi sebagai pengacara. Sejak selesai kuliah, saya bersama sejumlah teman mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Dharma Sena. Dan saya ditunjuk menjadi ketuanya. Tetapi nasib menentukan lain. Malah saya lebih tertarik dengan bisnis ini, hingga kantor pengacara itu saya tinggalkan dan kemudian bubar," kenang Rizal.

"Anjuran orang tua untuk menjadi PNS di Pemda Medan pun saya tolak. Karena saya menemukan tantangan di bisnis ini. Mungkin itu dikarenakan sejak SMP saya sudah berusaha mencari uang tambahan untuk menambah diri sendiri," sambungnya.

Bergabungnya Rizal di TPF, tidak lantas mendapatkan kursi empuk. Ia memulai karir awalnya sebagai seorang marketing. "Saya sudah rasakan rasakan pahit-manisnya sebagai

tenaga marketing. Karena dari jenjang marketing-lah saya tergabung di Trijaya hingga saat ini. Tetapi pahitnya sebagai tenaga marketing saat itu, sudah terbayarkan dengan apa yang saya peroleh saat ini," katanya.

Tentu saja pencapaian karir pribadinya tidak semudah membalik telapak tangan. Bagi Rizal, "Siapa yang mau kerja keras, dia pantas mendapatkan posisi teratas." Hal itulah yang menjadi kiat hidup Rizal dalam menapaki karirnya di industri PBK. Dan, hal itu pula yang hingga saat ini ditanamkan bagi para tenaga marketing yang tergabung di TPF.

Sementara jika Bicara TPF, Rizal mengatakan, perusahaannya menargetkan transaksi yang terus tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun. "Kami sudah siapkan sejumlah strategi. Diantaranya rencana mengembangkan kantor cabang di Wilayah Timur Indonesia. Dan, menggenjot transaksi kontrak multilateral baik yang ada di JFX maupun di BKDI," jelas Rizal Tua Hutasoit. ☺

BIJAK BERINVESTASI

Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan

Pelajari wakil pialang yang izin dari Bappebti

Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi

Pelajari risiko yang dihadapi

Pelajari kontrak berjangka komoditi yang di perdagangan

Pelajari dokumen-dokumen perjanjian

Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda berinteraksi

